



Perspektif Masyarakat tentang Bantuan Tunai Multiguna yang terkena dampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat

Latar Belakang

Pada 2018, serangkaian gempa bumi dan tsunami terjadi di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat mengakibatkan kerugian korban jiwa, kehilangan tempat tinggal, serta kerusakan infrastruktur yang signifikan. Setelah bencana, kedua provinsi menerima dukungan dari Pemerintah Indonesia dan beberapa mitra untuk proses pemulihannya. Di awal 2019, mitra pembangunan termasuk UNICEF bekerjasama dengan Tim Teknis Bantuan Tunai (Cash Working Group) di Indonesia meluncurkan program bantuan tunai multiguna di kedua provinsi ini. Empatika dilibatkan untuk menyediakan perspektif masyarakat terkait bantuan MPCA.

Pesan-pesan utama yang disampaikan masyarakat:

- » Masyarakat menginginkan uang tunai, meskipun bantuan dalam bentuk barang tetap dihargai, terutama segera setelah bencana terjadi dan sebelum pasar kembali beroperasi. Pada beberapa minggu pertama setelah bencana terjadi, keluarga menggunakan uang tunai untuk pengeluaran rutin (misalnya, bensin) atau pengeluaran tambahan (sebagai imbas langsung dari bencana, misalnya untuk air atau peralatan memasak) karena bantuan-bantuan yang diberikan di sebagian besar lokasinya umumnya sporadis, tidak merata, dan kurang memadai.
- » Masyarakat memilih menerima uang tunai lebih awal karena: (i) mata pencaharian terganggu dan keluarga-keluarga memiliki penghasilan yang terbatas bahkan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta (ii) bantuan tunai dapat digunakan untuk membeli kebutuhan mereka yang tidak tercukupi oleh bantuan-bantuan yang diberikan.
- » Masyarakat memiliki informasi yang terbatas mengenai program bantuan tunai multiguna ini. Para non-penerima bantuan biasanya tidak dilibatkan dalam proses sosialisasi dan tidak memperoleh informasi yang jelas terkait rencana program. Para penerima manfaat pun tidak memperoleh informasi yang lengkap dan jelas berkait frekuensi dan waktu pencairan bantuan, serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
- » Masyarakat menerima penargetan penerima bantuan mencakup ibu dengan anak dibawah umur 7 tahun dan ibu hamil, meskipun ada beberapa kasus dimana ibu-ibu yang sesuai dengan kriteria tidak bisa ikut karena kurangnya dokumen, sedang tidak ada di tempat saat program berjalan, atau isu lainnya seperti dokumen yang hilang.



Dengan siapa kami berinteraksi? Di Nusa Tenggara Barat, kami tinggal di dua komunitas di Kabupaten Lombok Utara, keduanya merupakan lokasi penerima manfaat dari program bantuan tunai multiguna. Kami berinteraksi secara dalam dengan 53 laki-laki dan perempuan di kedua lokasi tersebut, dimana 40 diantaranya merupakan penerima manfaat dan 13 lainnya bukan penerima manfaat.

Bagaimana cara kami mengumpulkan pengalaman mereka? Menggunakan ide-ide dan pendekatan metode kualitatif partisipatif, penelitian ini dijalankan menggunakan campuran pendekatan termasuk *Participatory Focus Group Discussions* (pFGD), imersi singkat, dan *Digital Storytelling* (DST). Di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat 16 pFGD difasilitasi dengan kelompok penerima manfaat (delapan sesi dengan perempuan dan delapan dengan laki-laki) bersama dengan tujuh pFGD dengan kelompok bukan penerima manfaat (kelompok campuran perempuan dan laki-laki). Pendekatan penelitian dimulai dengan imersi singkat selama dua hari di setiap komunitas untuk membantu memberikan konteks bagi tim peneliti dan untuk mengenal komunitas. Semua tim menginap di komunitas yang mereka kunjungi.



Para ibu di Lombok Bawah Ibu melakukan kegiatan keranjang pengeluaran.

Kebutuhan dan Prioritas Berdasarkan Masyarakat Yang Ditemui

Prioritas: Air menjadi prioritas utama di kedua lokasi di Lombok karena persediaan air bersih untuk mencuci dan minum membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih. Di kedua lokasi, pipa air tertimbun oleh longsor yang disebabkan oleh gempa dan masyarakat harus berjalan jauh untuk menemukan sumber air bersih atau terpaksa meminum air yang lebih kotor di sumber air terdekat. Meskipun beberapa bantuan telah berfokus pada penyediaan air minum bersih untuk kedua lokasi, jumlahnya tidak cukup dan keluarga harus membeli tangki air sampai persediaan air telah normal kembali. Lombok Atas¹ telah mengalami kerusakan yang lebih parah pada sumber air mereka dan meskipun beberapa dusun mulai memperbaiki sendiri, kebutuhan air bersih serta air untuk irigasi tetap menjadi prioritas bagi sebagian dari kedua lokasi Lombok.

Prioritas: Makanan menjadi prioritas di Lombok Bawah. Kebanyakan laki-laki di lokasi ini merupakan petani, baik memiliki lahan bertani kecil maupun bekerja sebagai buruh tani di lahan orang lain. Saat keluarga-keluarga memiliki persediaan beras yang tidak rusak mereka dapat bergantung pada persediaan tersebut setelah bencana sedangkan keluarga-keluarga yang tidak memiliki persediaan dan/atau tempat tinggalnya hancur atau rusak berat menghadapi masa-masa yang sulit. Pemerintah dan organisasi kemanusiaan juga cenderung terlambat sampai di lokasi setelah bencana dan masyarakat mengingat bahwa kerabat mereka dari luar kabupaten yang mengirimkan makanan-makanan serta tenda dan terpal pada hari-hari awal sebelum bantuan dari pemerintah dan organisasi lainnya sampai.

¹ Laporan ini menggunakan nama khusus untuk tiap lokasi penelitian. Nama-nama ini mencerminkan fitur kontekstual dari lokasi penelitian tersebut. Peta yang di halaman depan menampilkan nama lokasi tersebut.

Prioritas: Tempat tinggal, baik sementara maupun permanen, disampaikan sebagai prioritas di Lombok Bawah karena masyarakat mengalami kerusakan infrastruktur yang berat dengan banyaknya rumah yang roboh atau mengalami rusak parah. Kebutuhan akan tempat tinggal kebanyakan sudah dipenuhi di Lombok Bawah dan masyarakat sudah menerima terpal dan tenda besar dari pemerintah dan organisasi kemanusiaan lainnya beberapa minggu setelah gempa. Keluarga-keluarga yang tidak menerima bantuan tersebut mencoba untuk membangun tempat tinggal sementara menggunakan material dari reruntuhan rumah lama mereka dan serabut pohon kelapa. Pada saat penelitian lapangan di Juni 2019, kedua lokasi di Lombok telah menerima bantuan dari pemerintah untuk rehabilitasi rumah (POKMAS). Saat kebanyakan keluarga di Lombok Bawah telah mulai membangun kembali rumah mereka, di Lombok Atas hanya keluarga-keluarga yang rumahnya mengalami rusak berat yang sudah menerima bantuan Rumah POKMAS dan terdapat ketidakpastian apakah keluarga-keluarga dengan rumah yang hanya rusak sebagian akan menerima bantuan.

Tabel: Prioritas kebutuhan segera setelah gempa bumi

	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3
Lombok Atas	Air bersih	-	-
Lombok Bawah	Tenda, terpal	Makanan	Air bersih (di beberapa tempat)



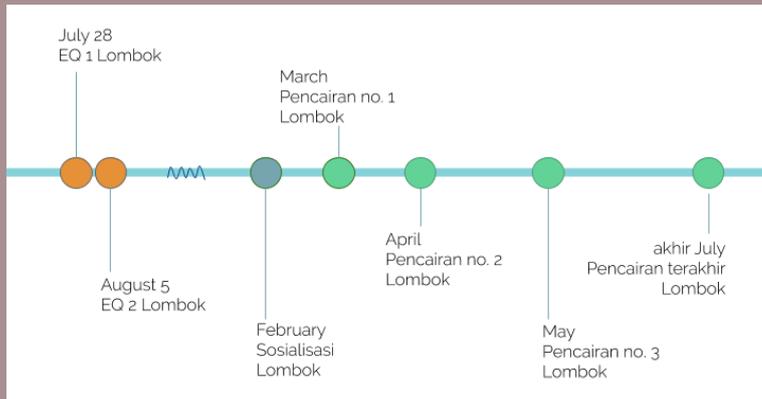
Kebutuhan yang terpenuhi



Kebutuhan yang terpenuhi secara sebagian

Catatan: Disusun berdasarkan pengamatan peneliti dan kegiatan partisipatif dengan berbagai kelompok di seluruh lokasi penelitian

Gambar: Linamasa Program MPCA di Lombok



Kebutuhan Uang Tunai

Karena bantuan untuk kedua lokasi bersifat sporadis, dan menurun setelah gempa bumi dan tsunami melanda Sulawesi Tengah², keluarga-keluarga membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Uang tunai diperlukan untuk membeli makanan seperti beras, mie instan, obat-obatan, dan air minum serta barang-barang non-makanan seperti sabun, sampo, popok, pembalut wanita, dan lainnya, walaupun keluarga-keluarga telah menerima beberapa barang-barang tersebut sebagai bantuan.

Pengeluaran rutin seperti pulsa ponsel dan pembayaran kembali pinjaman juga harus dipenuhi seperti biasa. Berbeda dengan lokasi Sulawesi Tengah, orang-orang di Lombok tidak diharuskan membayar tagihan listrik sampai baru-baru ini sebagai ketentuan khusus karena gempa bumi.



Keadaan Pasar Lokal

Kios dan pasar sempat tutup selama sekitar 1-2 bulan setelah gempa karena pemilik harus memperbaiki tempat mereka sebelum membuka kios atau lapak kembali. Beberapa pemilik kios di Lombok Bawah berbagi bahwa mereka telah memberikan barang-barang kepada orang-orang setelah gempa sementara pemilik kios yang lain sempat mengalami situasi barang-barang kios mereka dicuri. Di Lombok Atas, seorang pemilik kios memberi tahu kami bahwa walaupun kiosnya telah ditutup selama dua bulan, anak-anak masih datang ke rumahnya di belakang kios untuk membeli makanan ringan. Di kedua lokasi, orang-orang memiliki hutang dalam waktu yang cukup panjang pada kios tempat mereka membeli barang dimana mereka mengambil terlebih dahulu dan membayar kemudian ketika mereka mempunyai uang.

Kebutuhan uang tunai tetap ada pada saat penelitian lapangan berjalan tetapi mencerminkan perubahan kebutuhan pada keluarga. Masyarakat menjelaskan bahwa uang tunai diperlukan untuk 'hampir semuanya' terutama karena kegiatan mata pencaharian untuk laki-laki dan perempuan di lokasi penelitian belum sepenuhnya pulih. Sebagian besar orang di lokasi penelitian adalah pekerja upahan harian yang bekerja sebagai buruh tani. Yang lain, terutama di Lombok Atas, mereka yang memiliki lahan/kebun mengalami penurunan hasil panen dan harga serta berpikir hal ini terjadi karena perubahan tanah dan / atau masalah irigasi yang keduanya disebabkan oleh gempa.

Bantuan Rumah POKMAS juga telah memberikan peluang penghasilan bagi masyarakat di lokasi studi. Sebagai contoh, para ibu di Lombok Bawah berbagi bahwa ada 'banyak pekerjaan sekarang (karena POKMAS dan pekerjaan rekonstruksi umum)' tetapi khawatir kembali ke pertanian setelah POKMAS selesai karena pekerjaan pertanian reguler telah diabaikan. Di kedua lokasi, jumlah dan modalitas pembayaran untuk POKMAS berbeda berdasarkan kesepakatan yang dimiliki pekerja dengan kelompok atau kontraktor POKMAS sementara beberapa dibayar setiap hari, yang lain dibayar pada jangka waktu yang lebih lama atau pada akhir pekerjaan.

Pengalaman Masyarakat Berkait Transfer Uang Tunai

Di kedua lokasi, bantuan uang tunai ini diimplementasi oleh Catholic Relief Services (CRS). Penerima manfaat di kedua lokasi telah menerima pencairan ketiga. Pada Juli 2019, kedua lokasi masih menunggu pencairan keempat.

ToR untuk penelitian ini bertanya:

'Apakah anggota masyarakat lainnya mendapat informasi tentang tujuan dan kriteria kelayakan dari bantuan uang tunai?'

'Seluruh komunitas harus memiliki informasi tentang program' adalah sentimen yang disampaikan oleh masyarakat di kedua lokasi. Walaupun non-penerima memiliki pengetahuan tentang program bantuan tunai, tetapi bukan melalui interaksi langsung dengan program melainkan melalui percakapan informal antara tetangga, teman, kerabat atau aparat desa.

Sementara program bantuan ini dikhususkan untuk ibu dengan anak di bawah 7 dan wanita hamil saja, baik penerima maupun non-penerima berpikir bahwa akan lebih baik pada awal program digunakan banyak cara berbagi informasi yang 'resmi'. Para

² Serangkaian gempa bumi terjadi di pulau Lombok pada 29 Juli 2018 dan kemudian diikuti oleh gempa bumi dengan kekuatan 7 skala richter pada 5 Agustus 2019. Dua bulan kemudian, pada 28 September 2018, serangkaian gempa bumi terjadi di provinsi Sulawesi Tengah yang menyebabkan terjadinya tsunami.

Apa yang masyarakat ketahui mengenai struktur program?

Di Lombok Atas, sebagian besar masyarakat mengaitkan bantuan uang tunai ini dengan Posyandu dan menggunakan istilah 'uang posyandu' kemungkinan dikarenakan kader posyandu sudah terlibat sejak awal. Dimana kebanyakan kader mengenal orang-orang yang donor atau organisasi yang menjalankan program, beberapa merasa kurang yakin dan salah satu dari mereka menyatakan bahwa dia tidak paham tentang program namun dia 'harus mengumpulkan data posyandu di daerah saya'. Meskipun dukungan komunitas dan aparat desa tidak kurang di lokasi ini, para peneliti merasa bahwa aparat desa tidak terlalu dilibatkan dalam prosesnya. Pejabat desa dan kader mengatakan bahwa sebagian besar pekerjaan telah dilakukan secara langsung melalui kader dengan staf mitra lokal CRS yang secara langsung mengunjungi mereka untuk meminta pengumpulan data. Sosialisasi resmi untuk lokasi ini hanya terjadi pada hari pencairan pertama dan satu-satunya informasi yang didapatkan oleh para ibu yang memenuhi persyaratan sampai saat itu bergantung pada apa yang kader katakan kepada mereka - bahwa akan ada bantuan untuk anak-anak selama empat bulan ke depan.

Dibandingkan dengan Lombok Atas, kebanyakan masyarakat di Lombok Bawah mengetahui donor dan/atau organisasi yang menjalankan program bantuan ini.

'Prasyarat dan kriteria utama diperlukan untuk program transfer uang tunai yang efektif', *The Cash Learning Partnership (CaLP)*:

'Bantuan uang tunai, seperti bentuk bantuan lainnya, membutuhkan penerimaan masyarakat dan politis dan memastikan masyarakat menjadi bagian dalam proses program, dimulai dari perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan penutupan program.'

kader posyandu telah menjadi titik pertama informasi di kedua lokasi studi tetapi beberapa orang menginginkan informasi awal tentang program berasal dari kepala dusun diikuti oleh RT (kepala lingkungan) yang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Kader kemudian dapat membantu untuk mengumpulkan informasi tentang keluarga yang memenuhi syarat karena program tersebut berkaitan dengan wanita hamil dan anak-anak. Masyarakat di Lombok Atas merasa bahwa jika informasi disebarluaskan dengan cara ini, hal itu akan memastikan bahwa tidak ada keluarga yang memenuhi syarat yang terlewat karena semua orang di dusun akan memiliki informasi resmi.

Meskipun kepala desa telah dikonsultasikan sebelum pelaksanaan program, anggota masyarakat hanya diberi tahu tentang spesifikasi program pada saat sosialisasi, ketika program sedang berlangsung. Wanita hamil dan ibu dengan anak-anak di bawah 7 tahun telah diminta oleh kader posyandu pada awalnya untuk menghadiri sosialisasi di kedua lokasi studi, diikuti oleh pengumuman masjid oleh pejabat desa.

Panduan CaLP mengatakan:

'Sistem identifikasi penerima manfaat yang andal sudah ada atau dapat dibangun'

Program ini mengandalkan kader posyandu untuk mengidentifikasi perempuan yang memenuhi syarat (mungkin dari data posyandu) dan memberikan mereka informasi awal tentang program tersebut. Di Lombok Atas, pengumpulan data untuk ibu-ibu yang memenuhi syarat diburu-buru karena kepala dusun telah meminta kader untuk menyiapkan data pada hari berikutnya. Seorang kader dari satu

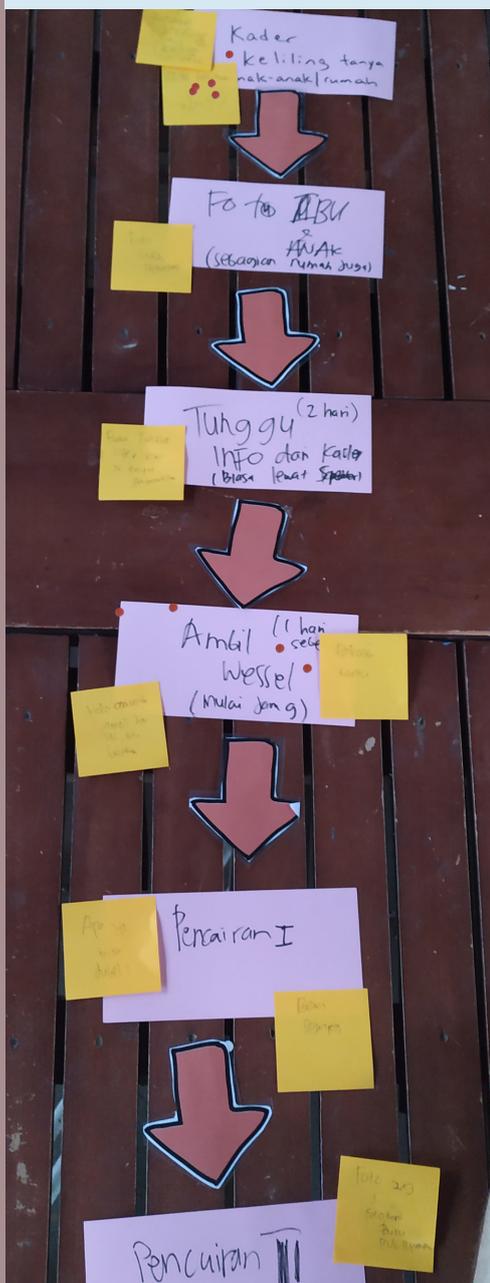


Diagram mekanisme yang dibuat ibu-ibu di Lombok Atas, menunjukkan bahwa mereka paling ingin mengubah (titik merah) persyaratan penerima untuk menyertakan semua anak sekolah; dan untuk memungkinkan mereka menerima bantuan pada waktu yang lebih fleksibel.

Tabel: Matriks program bantuan tunai

Kabupaten	Lombok Atas	Lombok Bawah
Kriteria Kelayakan	Rumah tangga dengan anak di bawah tujuh tahun dan/atau wanita hamil, tidak termasuk pegawai negeri sipil	
Kriteria lainnya	Rumah yang rusak - tetapi tidak diikuti (artinya keluarga dengan anak di bawah 7 tahun atau ibu hamil mendapat bantuan terlepas dari kerusakan pada rumah mereka)	
Uang dicairkan	1xRp 1.8 juta, 2xRp 900,000, 1xRp 450,000 per rumah tangga	
Penerima uang	Sebagian besar penerima adalah perempuan atau pengasuh	

dusun juga berbagi bahwa kepala dusun di sana telah 'kehilangan' sebagian daftar yang dia serahkan kepada kepala dusun. Akibatnya, ibu-ibu dari salah satu daerah yang lebih terpencil di masyarakat belum menerima bantuan uang tunai. Sementara kader telah mencoba untuk memperbaiki situasi setelah itu; insiden itu, tampaknya, belum ditindaklanjuti oleh mitra pelaksana lokal.

ToR untuk penelitian ini mengatakan:

'Menurut penerima manfaat apa yang dapat dilakukan oleh para penggerak program uang tunai dalam proyek-proyek di masa depan dalam hal mekanisme pengiriman uang?'

'Apa pendapat/pandangan penerima manfaat tentang modalitas uang tunai dikirimkan?'

Pencairan uang tunai di Lombok dilakukan melalui kantor pos dan penerima telah menerima informasi untuk mengambil wesel mereka dari titik-titik distribusi tertentu di desa sehari sebelum distribusi uang tunai. Penerima di Lombok Bawah telah menerima SMS dari UNICEF yang memberi tahu mereka tentang distribusi wesel. Beberapa ibu di kedua lokasi memberitahu kami bahwa mereka menyukai menerima wesel atas nama mereka karena itu berarti hanya mereka yang dapat menerima uang tunai.

Semua pencairan bantuan uang tunai dilakukan di desa biasanya sehari setelah penerima menerima wesel mereka. Meskipun tidak ada keluhan tentang mekanisme pengiriman tunai, masyarakat di kedua lokasi berbagi bahwa **kurangnya tempat distribusi yang cukup berarti mereka harus menunggu lama**

Kelayakan

Bantuan uang tunai multiguna di Lombok ditargetkan untuk ibu hamil dan ibu dengan anak di bawah 7 tahun. Meskipun dokumen program bantuan uang tunai multiguna untuk Lombok menyatakan bahwa kriteria tambahan kerusakan rumah akan dipertimbangkan, di kedua lokasi Lombok ini tampaknya tidak digunakan untuk kelayakan. Seorang kader posyandu di Lombok Atas menyatakan bahwa ketika 'petugas' (dari mitra CRS) memotret rumah-rumah ibu yang memenuhi syarat, mereka akan mencatat apakah keluarga tersebut menerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan tingkat kerusakan 'resmi' dari rumah tetapi pada akhirnya ini tidak mengubah kelayakan para ibu untuk menerima bantuan uang tunai.

Pengecualian keluarga pegawai negeri dari bantuan tunai merupakan kriteria yang seragam di seluruh lokasi. Para non-penerima bantuan di kedua lokasi sebagian besar menerima bahwa bantuan itu hanya untuk anak-anak dan ibu hamil. Mereka yang memenuhi syarat tetapi tidak mendapatkan bantuan adalah karena mereka tidak memiliki dokumentasi yang tepat, sedang bepergian pada saat pendaftaran atau, seperti dalam kasus Lombok Atas, karena kepala dusun diduga kehilangan sebagian daftar kelayakan.

Meskipun memahami kriteria kelayakan, masyarakat masih merasa bahwa bantuan tunai dapat diperluas ke kelompok yang mereka anggap rentan dan membutuhkan bantuan seperti orang tua, keluarga dengan anak usia sekolah, serta keluarga dengan pendapatan rendah.



Peneliti di Lombok Atas dalam imersi kecil mengunjungi salah satu daerah terpencil di salah satu dusun (melalui jalur setapak ini) yang tidak menerima bantuan tunai dengan salah satu kader. Para ibu di daerah terpencil harus melewati jalur ini saat mereka berbelanja di kios dan mengakses layanan seperti Posyandu dimana membutuhkan 45 menit hingga 1 jam berjalan kaki satu arah.

untuk menerima uang tunai. Sebagai contoh, Lombok Bawah memiliki dua titik distribusi untuk 10 dusun dan beberapa ibu mengatakan bahwa mereka telah menghabiskan waktu yang lama menunggu giliran mereka untuk menerima uang tunai. Sebagian besar ibu membawa serta anak-anak mereka dan mengingat bahwa 'sulit menjaga mereka (anak-anak) di sana begitu lama' karena mereka menangis dan lapar. Di Lombok Atas, satu titik distribusi melayani setidaknya lima dusun yang berarti bahwa beberapa ibu harus menunggu sampai sore untuk menerima uang tunai. Ada juga beberapa ibu di sini yang menginginkan proses pencairan uang tunai 'fleksibel' seperti PKH karena dilakukan menggunakan kartu tipe ATM, dimana penarikan dapat dilakukan dengan nyaman. Ini mungkin terkait dengan fakta bahwa seorang ibu yang memenuhi syarat di sini telah melewati masa pengambilan weselnya saat dia keluar dari desa pada saat itu. Ibu ini bercerita bahwa sejak dia melewatkan wesel pertama ini, dia tidak hanya melewatkan pencarian pertama tetapi semua pencairan uang berikutnya.



Masyarakat di Lombok menjelaskan pencairan bantuan uang tunai multiguna dilakukan di dua titik pencairan dalam satu desa. Biasanya menggunakan area kecil seperti beruga ini yang mengakibatkan antrean lama untuk sebagian ibu.

Kegunaan Uang Bantuan

Para penerima manfaat menceritakan bahwa dalam proses sosialisasi, uang bantuan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak-anak. Beberapa barang dilarang dibeli dengan uang bantuan tersebut. Sebagian besar dari barang-barang yang tidak diperbolehkan biasanya dianggap sebagai barang-barang yang 'tidak terlalu penting' seperti rokok, beberapa penerima manfaat juga ingat bahwa mereka dihimbau untuk tidak membayar hutang atau mengambil pinjaman baru dengan uang tersebut.

Meskipun diminta untuk tidak membayar hutang mereka, banyak keluarga di kedua lokasi yang menggunakan uang bantuan tersebut untuk membayar hutang mereka pada warung/kios-kios lokal. Di Lombok Bawah, beberapa ibu menceritakan bahwa mereka meminjam 'uang yang banyak' pada teman dan tetangga setelah gempa, kemungkinan besar karena mereka dan suami mereka belum kembali ke pekerjaan mereka semua sebagai buruh tani setelah gempa. Para ibu ini dapat melunasi sebagian hutang mereka dengan uang bantuan ini.

Kebanyakan keluarga menggunakan uang bantuan ini untuk membeli bahan makanan seperti beras, jajanan seperti mie instan dan biskuit, sayur, ikan, dan minyak masak; bukan bahan makanan seperti sabun, sampo, lotion, bensin, gas, dan membayar biaya listrik dan pulsa telepon seluler. Semua barang-barang tersebut dianggap sebagai kebutuhan mendasar dimana keluarga-keluarga di kedua lokasi menyatakan bahwa beras merupakan hal pertama yang mereka beli dengan uang bantuan karena tidak semua keluarga



Pada kegiatan keranjang kebutuhan bersama para ayah di Lombok Atas, banyak ayah yang menjelaskan bahwa keluarga mereka menggunakan uang bantuan untuk membeli jajanan anak. Meskipun tidak ada yang menganggap pengeluaran ini sebagai pengeluaran yang paling penting (titik merah), sebagian ayah sadar bahwa jajanan merupakan salah satu pembelian yang paling mahal karena anak-anak selalu meminta uang setiap hari.

memiliki lahan padi. Uang jajan juga dianggap sebagai kebutuhan mendasar dan sebagian ayah di Lombok Atas menghitung pengeluaran bulanan untuk jajan (keluarga dan uang jajan anak) dan mereka terkejut saat menyadari pengeluaran untuk uang jajan lebih besar dari pengeluaran untuk beras sebesar Rp 250.000.

Uang bantuan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan bayi-bayi dan anak-anak, seperti untuk popok dan susu formula serta membeli peralatan sekolah dan mainan-mainan kecil (seharga Rp 50.000).

Saat uang tunai baru tersedia sekian lama setelah bencana, masyarakat mendeskripsikan prioritas secara berbeda. Saat bantuan tunai didistribusikan para keluarga biasanya berada di masa dimana mereka berpikir untuk membenahi rumah mereka atau bahkan berinvestasi ketimbang untuk pemulihan. Peristiwa musiman lainnya yang memiliki implikasi keuangan seperti tahun ajaran baru juga mempengaruhi cara bantuan tunai dilihat dan digunakan. Asumsi-asumsi seputar transfer tunai perlu ditinjau dengan saksama sehingga sistem beroperasi dengan cara yang direncanakan dan memenuhi tujuan yang dimaksud.

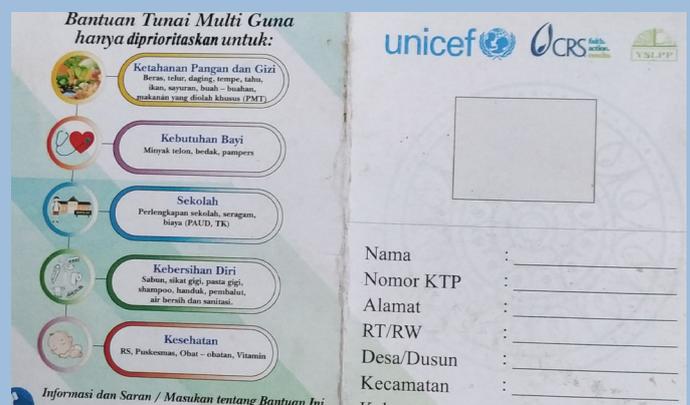
Mekanisme Keluhan

ToR untuk studi ini mengatakan:

'Apakah mereka (komunitas) tahu bagaimana mereka dapat mengajukan keluhan tentang staf atau layanan?'

'Apakah keluhan ditangani dengan memuaskan oleh mitra pelaksana?'

Para penerima bantuan di kedua lokasi penelitian telah menerima buklet yang mencakup jumlah setiap pencairan uang tunai, beberapa informasi tentang tujuan penggunaan bantuan uang tunai dan memberikan nomor telepon untuk komentar atau keluhan. Namun, tim studi tidak bertemu siapa pun yang menggunakan nomor tersebut yang membuat kami percaya bahwa orang-orang tidak menyadarinya atau lebih suka menghubungi kader. Dalam dua kasus di mana orang mendaftarkan pengaduan, keduanya melalui kader dan terutama karena kader mengambil inisiatif untuk menghubungi mitra pelaksana meskipun tidak jelas apakah tindak lanjut telah dilakukan. Program apa pun di masa depan harus mencatat perlunya memiliki proses yang berguna dan jelas untuk mendaftarkan pengaduan dan kemampuan untuk merespons dengan cepat jika diperlukan.



Buku yang diterima oleh penerima MPCA di Lombok. Di dalamnya ada rincian pencairan sementara halaman belakang (kiri) mencatat dua nomor pengaduan beserta bagaimana uang itu seharusnya dipake - untuk makanan dan nutrisi; kebutuhan bayi; sekolah; kebutuhan kebersihan; dan kesehatan.